

STUDI ANALISIS PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Rosyidi¹, Muhammad Syaifudin ²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau

Email: rosydhee@yahoo.com, M.syaifuddin@uin-suska.ac.id

Abstrak. Pendidikan pada saat sekarang telah menjadi bagian integral dari ruang publik. Misalnya bagaimana pemerintah membuat dan menerapkan kebijakan Ujian Nasional (UN) kemudian berubah menjadi kegiatan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Program evaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Artinya, ujian nasional bukan hanya menjadi keprihatinan beberapa orang atau kelompok tertentu, namun juga menjadi keprihatinan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, oleh karena itu maka muncul kebijakan baru yaitu Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji tentang penelitian kebijakan Pendidikan sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan Pendidikan dimasa yang akan. Sedangkan metode penulisan dalam jurnal ini adalah menggunakan metode kepustakaan, dimana sumber kajian berasal dari literatur-literatur yang membahas terkait penelitian kebijakan Pendidikan.

Kata Kunci : Penelitian, Kebijakan Pendidikan

Abstract. Education today has become an integral part of the public sphere. For example, how the government created and implemented the National Examination (UN) policy and then turned it into a Computer-Based National Assessment (ANBK) activity, an evaluation program organized by the Ministry of Education and Culture. This evaluation program is intended to improve the quality of education by photographing the input, process and output of learning in all educational units. This policy has advantages and disadvantages. This means that the national exam is not only a concern for certain people or groups, but also a concern for Indonesian society as a whole, therefore a new policy has emerged, namely the Computer-Based National Assessment (ANBK). The aim of writing this journal is to examine educational policy research so that it can be used as a consideration in making educational policies in the future. Meanwhile, the writing method in this journal uses the library method, where the study sources come from literature that discusses education policy research.

Keywords: Research, Education Poli

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah domain yang secara signifikan memengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Saat ini, peran pendidikan telah menjadi sebuah entitas integral dalam ruang publik, yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya investasi dalam pembangunan manusia. Salah satu contoh konkrit dari intervensi pemerintah dalam pendidikan adalah melalui implementasi berbagai kebijakan, seperti perubahan dari Ujian Nasional (UN) menuju kegiatan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemdikbud). Program evaluasi ini diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menelaah secara holistik input, proses, dan output pembelajaran di seluruh unit pendidikan.

Pergeseran kebijakan ini bukanlah tanpa tujuan. Kebijakan tersebut menimbulkan serangkaian diskusi tentang kelebihan dan kekurangannya. Artinya, ujian nasional tidak lagi hanya menjadi perhatian segelintir individu atau kelompok, tetapi telah menjadi sorotan utama masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sebagai respons atas dinamika tersebut, muncul inisiatif baru dalam bentuk Asesmen

Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang penelitian kebijakan pendidikan, sehingga mampu menjadi landasan yang kuat bagi pembuat kebijakan pendidikan di masa yang akan datang. Metode penulisan dalam jurnal ini mengadopsi pendekatan kepustakaan, dimana sumber-sumber literatur yang relevan menjadi basis analisis utama dalam menggali berbagai aspek terkait dengan penelitian kebijakan pendidikan.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penelitian kebijakan pendidikan tidak hanya memandang kebijakan sebagai suatu entitas statis, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi implementasinya. Melalui analisis mendalam terhadap literatur yang relevan, diharapkan jurnal ini mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman kita akan proses pembuatan kebijakan pendidikan dan implikasinya bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian library research. Penelitian pustaka dalam konteks ini menyoroti peran pendidikan sebagai elemen krusial dalam pembentukan dan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara. Dalam era kontemporer, pendidikan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ranah publik, menunjukkan kesadaran akan pentingnya alokasi sumber daya dan upaya investasi dalam meningkatkan kualitas manusia. Contoh konkret dari campur tangan pemerintah dalam konteks pendidikan adalah melalui implementasi berbagai kebijakan, yang termasuk transformasi dari Ujian Nasional (UN) menuju Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Program evaluasi ini ditujukan untuk mengevaluasi secara menyeluruh aspek input, proses, dan output pembelajaran di berbagai unit pendidikan, dengan tujuan meningkatkan mutu

keseluruhan sistem pendidikan.

Selanjutnya, pergeseran kebijakan ini memunculkan beragam diskusi yang mendalam mengenai manfaat dan keterbatasan dari pendekatan baru tersebut. Tidak lagi sekadar menjadi perhatian segelintir individu atau kelompok, ujian nasional dan kemudian ANBK menjadi sorotan utama masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sebagai respon terhadap dinamika ini, muncul inisiatif baru dalam bentuk ANBK. Penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki dengan mendalam aspek kebijakan pendidikan, guna memberikan landasan yang kokoh bagi proses pembuatan kebijakan pendidikan di masa depan. Pendekatan yang diambil dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode kepustakaan, di mana sumber-sumber literatur yang relevan menjadi dasar utama dalam menganalisis berbagai aspek terkait dengan penelitian kebijakan pendidikan.

HASIL PENELITIAN

Pengertian Penelitian Kebijakan

Apa itu penelitian kebijakan? Danim (2005) memberikan pengertiannya dengan membedakan penelitian kebijakan dengan penelitian tradisional. Menurutnya, ada dua jenis penelitian yaitu penelitian tradisional dan penelitian kebijakan. Dalam konteks ini, penelitian tradisional tidak dibandingkan dengan penelitian kebijakan sebagaimana penelitian modern, namun justru keunikannya. Kekhasan penelitian kebijakan sendiri terletak pada fokus permasalahan yang dijadikan tujuan penelitian kebijakan.

Dalam penelitian politik, yang perlu ditarik bukanlah ruang lingkup pembobotan ilmiah hasil penelitian, melainkan ruang lingkup penerapannya dalam penyelesaian permasalahan sosial. Pengertian riset kebijakan seringkali disalahartikan dengan analisis kebijakan. Nugroho (2009) membedakan analisis kebijakan menjadi dua bidang, yaitu analisis untuk kebijakan dan analisis tentang kebijakan. Analisis kebijakan dilakukan secara paralel, sedangkan penelitian kebijakan, yaitu studi tentang kebijakan yang ada. Analisis kebijakan, merupakan aktivitas yang terjadi sebelum

perumusan kebijakan.

Analisis dan penelitian kebijakan juga dapat dibedakan dengan monitoring dan evaluasi kebijakan. Untuk lebih jelas memahami masing-masing perbedaannya, perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Perbedaan antara analisis monitoring, evaluasi dan penelitian kebijakan (Nugroho, 2009)

	Analisis Kebijakan	Monitoring Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	Penelitian Kebijakan
Produk (output)	Nasehat, advis, dan/atau rekomendasi kebijakan	Laporan perkembangan (progress report)	Penilaian terhadap sebagian atau seluruh dimensi dari proses kebijakan	Pemahaman yang mendalam akan suatu kebijakan
Pendekatan (kecenderungan)	Ilmu Kebijakan	Pragmatis/Praktis	Strategis	Metodologis
Waktu Pelaksanaan (timing)	Pra-Kebijakan	Pada saat kebijakan diimplementasikan	Pasca (implementasi) kebijakan	Pra, implementasi atau pasca (implementasi)
Pelaksana	Analisis Kebijakan	Pengawas program	Tim Evaluasi Kebijakan	Lembaga keilmuan (universitas, dll)
Lama (durasi)	Sangat pendek hingga menengah	Sepanjang implementasi	Menengah	Pendek hingga panjang

Pengertian Penelitian Kebijakan Pendidikan

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai berbagai definisi penelitian kebijakan dan penerapannya pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, khususnya pendidikan sebagai kebijakan publik, yang membedakan hanyalah subjek penelitiannya. Oleh karena itu, penelitian kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai studi terhadap kebijakan pendidikan yang ada. Penelitian kebijakan pendidikan dapat dibedakan dari analisis, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pendidikan.

Analisis kebijakan pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum atau pada saat proses awal perumusan suatu kebijakan pendidikan. Pemantauan kebijakan pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memahami kemajuan kebijakan pendidikan ketika diterapkan di lapangan. Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah penerapan suatu kebijakan pendidikan dan melibatkan evaluasi terhadap sebagian atau seluruh aspek proses

kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan, seperti halnya bidang politik lainnya, merupakan proses kebijakan publik dan terdiri dari perumusan kebijakan pendidikan, pelaksanaan kebijakan pendidikan, dan lingkungan politik. Oleh karena itu, meskipun penelitian kebijakan pendidikan dapat dilakukan pada seluruh aspek proses kebijakan pendidikan, namun tidak dapat dilakukan dengan tujuan utama pemahaman (untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan pendidikan) dan rekomendasi kebijakan.

Untuk mencapai pemahaman yang mendalam tersebut, penelitian dilakukan dalam jangka waktu yang panjang (menurut Nugroho, 2009). Khusus untuk penelitian kebijakan pendidikan dapat dijelaskan cakupannya sebagai berikut:

1. Penelitian tentang isi kebijakan pendidikan, yaitu penelitian untuk menilai suatu kebijakan dari sisi muatan atau isinya. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis isi, baik yang bersifat kuantitatif (frekuentif, semantik) atau bersifat kualitatif (bingkai semiotik, kecenderungan politik, filosofis), maupun komparatif, misalnya perbandingan antara UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.
2. Penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan, yaitu penelitian tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan.
3. Penelitian tentang kinerja kebijakan pendidikan, yaitu penelitian yang berkenaan dengan pencapaian dari kebijakan pendidikan dibandingkan dengan target atau rencana pencapaian yang diharapkan. Metode yang dapat digunakan adalah metode *gap analysis* (analisis kesenjangan).
4. Penelitian tentang lingkungan kebijakan pendidikan, yaitu penelitian yang berkenaan dengan pengaruh lingkungan kebijakan terhadap perumusan suatu kebijakan, implementasi kebijakan, dan kinerja suatu kebijakan pendidikan.
5. Penelitian tentang proses kebijakan pendidikan, yaitu penelitian yang berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan pendidikan berproses secara kelembagaan, yang mencakup: proses perumusan, rumusannya, implementasi, kinerja yang dicapai, dan lingkungan di mana kebijakan pendidikan tersebut berada.

Ciri-Ciri Penelitian Kebijakan

Ciri-ciri penelitian kebijakan yang membedakan antara penelitian kebijakan dengan jenis penelitian lainnya, menurut Rosyada (2010) mengidentifikasi ciri-ciri umum penelitian kebijakan sebagai berikut:

1. *Basic social research*; yakni penelitian kebijakan harus dilaksanakan sesuai prosedur kerja ilmiah
2. *Technical social research*; yakni bahwa penelitian kebijakan harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat dikembangkan instrumen-instrumen teknisnya
3. *Policy research*; harus menghasilkan sebuah kebijakan publik
4. Komprehensif; yakni penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dan relevan dengan persoalan yang sedang dikaji untuk dirumuskan kebijakan penyelesaiannya.

Karakteristik Penelitian Kebijakan

Selain memiliki ciri-ciri umum, penelitian kebijakan juga memiliki ciri-ciri khusus. Rosyada (2010) menyebutkan ciri-ciri khusus penelitian kebijakan sebagai berikut:

1. Memiliki fokus multidimensional
 - a. Penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dengan permasalahan yang sedang dirancang kebijakan untuk penyelesaiannya.
 - b. Penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dengan gagasan atau ide pengembangan sebagai upaya melakukan perubahan-perubahan pendidikan/sosial.
2. Bersifat induktif-empirik
 - a. Perumusan teori (bahan kebijakan) berbasis data, bukan berbasis teori
 - b. Tidak dimulai dengan perumusan proposisi dan hipotesis
 - c. Berbasis teori *verstehien*, tetapi tidak selalu mencari makna, karena kebijakan memerlukan indeks angka
 - d. Dikembangkan dengan teori psikologi-ekologis
 - e. Dengan demikian, data penelitian harus diolah dengan menghitung frekuensi dan distribusi frekuensi
 - f. Data penelitian kebijakan harus diolah dan dianalisis dengan berbagai model analisis, dari analisis kecenderungan, ketergantungan dan ramalan.
3. Berorientasi ke depan dengan memperhatikan kejadian sebelumnya
 - a. Penelitian kebijakan harus berorientasi

ke masa depan (*visioner*)

- b. Penelitian kebijakan harus mampu menjelaskan ramalan yang terukur dan meyakinkan seluruh pemangku kepentingan
- c. Penelitian kebijakan harus memiliki dialektika sejarah dengan kejadian sebelumnya
4. Berorientasi permintaan pemangku kepentingan
 - a. Penelitian kebijakan harus sesuai dengan hasil penilaian terhadap kebutuhan dan permintaan target grup dari kebijakannya itu
 - b. Penelitian kebijakan harus menghasilkan rumusan-rumusan yang implementatif, mudah dikontrol dan bahkan bisa diintervensi
5. Melahirkan rumusan yang meyakinkan dengan menjelaskan nilai lebih dari kebijakannya itu sehingga masyarakat bisa menerima karena rasionalismenya bukan karena otoritarianisme kekuasaan.

Pendekatan Analisis Penelitian Kebijakan

Untuk menganalisis data penelitian kebijakan seorang peneliti dapat menggunakan beberapa pendekatan. Dunn (1995) menyebutkan tiga pendekatan analisis penelitian kebijakan, yaitu:

- a. Pendekatan empiris adalah untuk menjelaskan sebab dan akibat dari kebijaksanaan publik. Misalnya, pendekatan ini digunakan untuk menggali informasi tentang bagaimana kebijakan Kementerian Agama terhadap penyandang cacat dalam bidang pendidikan.
- b. Pendekatan evaluatif adalah untuk menentukan harga atau nilai dari beberapa kebijaksanaan. Misalnya, pendekatan ini digunakan untuk menggali data tentang apa saja peraturan yang telah dikeluarkan, apa saja program yang telah dibuat dan dilaksanakan, serta fasilitas apa saja dari Kementerian Agama yang dapat diakses oleh penyandang cacat yang belajar di satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama.
- c. Pendekatan normatif untuk mengakomodir pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan *problem-problem* kebijaksanaan. Misalnya, pendekatan ini digunakan untuk menggali data tentang sejauhmana penyandang cacat memperoleh manfaat dari kebijakan Kementerian Agama dalam demokratisasi pendidikan.

Selain menggunakan pendekatan yang telah direkomendasikan oleh Dunn tersebut, seorang peneliti dapat pula menggunakan pendekatan-pendekatan seperti tersebut di bawah ini:

- a. Institutional model : terkait dengan lembaga yang membuat dan melegitimasi kebijakan, serta bagaimana lembaga tersebut menggunakan kekuasaan agar kebijakan yang dibuat dilaksanakan
- b. Process model: evaluasi dan analisis kebijakan yang menggunakan model proses, mengikuti langkah sebagai berikut: (1) identifikasi masalah dan keuntungan untuk pembuat kebijakan, (2) formulasi rancangan kebijakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (legislatif, staf ahli, kelompok-kelompok yang berkepentingan), legitimasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
- c. Rational model: analisis kebijakan dari sudut pandang teori pilihan rasional (rational choice theory), seberapa besar keuntungan sosial yang akan diperoleh dibanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan.
- d. Incremental model: review sistematis terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu, dengan dasar pemikiran bahwa suatu kebijakan selalu merupakan kelanjutan, perubahan atau bagian dari kebijakan lain yang sudah pernah ada.
- e. Group model: analisis kebijakan dari sudut pandang peran sistem politik sebagai penegak dan pendorong terselenggaranya kompromi di antara berbagai macam konflik kepentingan dalam masyarakat.
- f. Elite model: kebijakan hampir selalu merupakan refleksi kepentingan individu/kelompok yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat, dan tidak dikonstruksi untuk kepentingan masyarakat luas.
- g. Six-steps model: analisis kebijakan yang mengacu pada 6 langkah standar, yaitu: (1) memverifikasi, mendefinisi, dan memerinci problematika, (2) menetapkan kriteria evaluasi, (3) mengidentifikasi kebijakan alternatif, (4) mengevaluasi kebijakan alternatif, (5) memaparkan dan menunjukkan perbedaan di antara kebijakan alternatif, dan (6) memonitor implementasi kebijakan (Kemenpora, 2010).

Metode Penelitian Kebijakan

Banyak metode penelitian yang dapat digunakan atau dikombinasikan dalam penelitian kebijakan. Nazir (1985) merekomendasikan lima metode penelitian, yaitu:

- a. Metode sejarah, yang menggunakan pendekatan historis dengan menggunakan catatan observasi atau pengamatan orang lain yang tidak dapat diulang-ulang kembali.
- b. Metode deskripsi, yaitu suatu metode untuk meneliti atau mendeskripsikan status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode deskripsi ini dapat dibagi lagi menjadi: metode survey, metode deskripsi berkesinambungan, metode studi kasus, metode analisis pekerjaan atau aktivitas, metode studi komparatif, dan metode studi waktu dan gerakan.
- c. Metode eksperimen, yaitu metode penelitian di bawah kondisi buatan oleh peneliti, yang akhirnya seorang peneliti dapat melakukan manipulasi dan mengontrol objek penelitian.
- d. Metode grounded research, yaitu suatu metode penelitian yang mendasarkan diri pada fakta dengan tujuan melakukan generalisasi, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori dan menemukan teori. Metode ini pada hakekatnya merupakan proses pencarian data sebanyak-banyaknya, yang diawali dengan fase memasuki kerja lapangan tanpa berbekal hipotesis, mendeskripsikan peristiwa atas dasar observasi dan memformulasikan penjelasan perihal munculnya peristiwa itu atas dasar observasi.
- e. Metode penelitian tindakan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menetapkan suatu desain keputusan di masa depan.

Metode-metode yang telah disebutkan di atas telah direkomendasikan para ahli penelitian untuk digunakan dalam penelitian kebijakan. Meskipun demikian, dalam menetapkan suatu metode atau mengkombinasikan beberapa metode, seorang peneliti hendaknya menyesuaikannya dengan fokus masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, Majchrzak (dalam Danim, 2005) memberikan lima petunjuk dasar untuk merancang metodologi penelitian kebijakan,

yaitu:

1. Secara ideal penelitian kebijakan adalah penelitian yang mengkombinasikan beberapa metode penelitian yang berbeda, misalnya metode kualitatif dan kuantitatif. Kombinasi semacam itu mempunyai banyak keuntungan, seperti: validitasnya lebih tajam, hasilnya lebih mantap, dan menambah keluasan wawasan. Ada beberapa variasi kombinasi metode kualitatif dengan metode kuantitatif atau sebaliknya, yaitu:
 - a. Fokus utama data kualitatif dan data kuantitatif bersifat sebagai pelengkap;
 - b. Fokus utama data kuantitatif dan data kualitatif bersifat sebagai pelengkap;
 - c. Fokus utama data yang dicari di lapangan ditentukan oleh ketersediaan data;
 - d. Analisis data kuantitatif dan selanjutnya dibahas secara kualitatif;
 - e. Deskripsi atau analisis kualitatif dengan disertai bukti-bukti kuantitatif.
2. Peneliti dapat menggunakan pendekatan empiris-induktif, antar aksi masalah sosial yang berbeda untuk dicarikan pemecahannya. Dalam penelitian kebijakan, metodologi yang disusun dimungkinkan untuk diadaptasi secara rutin (tidak kaku) dalam konteks interaksinya dengan masalah.
3. Metodologi harus lebih didasarkan atas pertanyaan penelitian
4. Oleh karena adanya keterbatasan waktu dan sumber studi yang secara tipikal dihadapi peneliti kebijakan, seorang peneliti dapat menggunakan instrumen yang sudah ada/tersedia, seperti: instrumen tes intelegensi, tes kecenderungan kepribadian, dan instrument-instrumen lain yang telah divalidasi.
5. Seorang peneliti kebijakan hendaknya merefleksi lingkungan social-politik di mana penelitian dilakukan. Rancangan metodologi harus responsif terhadap berbagai kritik terutama berkenaan dengan validitas studi, iklim politik, kondisi social yang senantiasa berubah yang kemungkinan memberi efek terhadap kesimpulan

KESIMPULAN

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan, hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian kebijakan pendidikan adalah studi tentang kebijakan pendidikan yang

ada. Kebijakan pendidikan meliputi proses perumusan, pelaksanaan, penerapan kebijakan pendidikan, dan lingkungan hidup.

2. Penelitian kebijakan pendidikan dapat dibedakan dari analisis, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan merupakan proses awal untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Pemantauan kebijakan pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan bidang penelitian yang cukup luas. Kebijakan pendidikan juga mencakup teknologi pembelajaran. Contoh: kebijakan sosialisasi, pemanfaatan produk teknologi pembelajaran, kesempatan pembelajaran, dan lain-lain. Hasil meta-analisis penelitian disertasi UM menunjukkan bahwa desain penelitian kebijakan pendidikan sangat minim digunakan (hanya 1 buah). Hal ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menggunakan desain penelitian ini dalam penelitian-penelitian di bidang teknologi pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Asisten Deputi Iptek Olahraga. 2010. *Panduan Penelitian Evaluasi dan Penelitian Kebijakan Olahraga*. Jakarta: Deputi Iptek Olahraga Kemenpora.
- Danim, S. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Dunn, W.N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. (peny.: Muhadjir Darwin). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mayer, R.R. & Greenwood, E. 1984. *The Design of Social Policy Research*. (terj. Sutan Zanti Arbi & Wayan Ardana). Jakarta: Rajawali.
- Nazir, M. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noeng, M. 2003. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nugroho, R. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rahardjo, M. 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Pendidikan*, (online), (<http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/111-pengantar-analisis-kebijakan->

pendidikan.html), diakses 25 November 2010.

Rosyada, D. 2010. *Penelitian Kebijakan*, (online), (<http://www.scribd.com/doc/24000181/penelitian-Kebijakan>), diakses 11 November 2010.

Tilaar, H.A.T. & Nugroho, R (2009). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.